

Urgensi GCIO untuk Mewujudkan Manajemen Informasi Berbasis *Connected Government* di Daerah Istimewa Yogyakarta

Urgency of GCIO to Actualize Information Management Based on Connected Government in Yogyakarta Special Region

R.M. Agung Harimurti

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta
Jl. Imogiri Barat Km.5 Yogyakarta 55187, Telp/Fax: 0274-377523

agung.harimurti@gmail.com

Diterima: 18 Januari 2016 || Revisi: 15 April 2016 || Disetujui: 27 April 2016

Abstrak - Penelitian ini berjudul “Urgensi *Government Chief Information Officer* (GCIO) dalam mewujudkan Manajemen Informasi berbasis *Connected Government* di DIY”. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan proses manajemen informasi berbasis *connected government* di Pemda DIY untuk mengetahui pentingnya keberadaan GCIO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan FGD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen informasi Pemda DIY belum berjalan secara efektif. Salah satu sebabnya adalah belum adanya kepemimpinan yang berfungsi sebagai *top manajemen* dan wadah yang memayungi serta memadukan aktivitas manajemen informasi di Pemda DIY secara efektif. Implikasi penelitian ini adalah dibutuhkan sebuah model manajemen informasi yang efektif dengan basis GCIO sebagai faktor kunci di Pemda DIY.

Kata Kunci: GCIO, manajemen informasi, *connected government*, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract - *The research is entitled "Urgency of Government CIO to Actualize Information Management Based on Connected Government in Yogyakarta Special Region. The aim of the research is to know the importance of GCIO on the managing information process. The study used a qualitative approach. While data collection techniques used were depth interviews, observation, and FGD. The results indicate that the lack of leadership who serves as the top management and integrate the process of information management in DIY is not effective yet. The result contribution is an effective information management model with base GCIO as a key factor in the Government of Yogyakarta Special Province.*

Keywords: *GCIO, information management, connected government, Yogyakarta Special Region*

PENDAHULUAN

Informasi merupakan hasil olahan data dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu *backbone* ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan modal dasar bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, atau dikenal sebagai *knowledge base society*. Manajemen informasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh kegiatan dalam entitas yang berhubungan dengan penggunaan informasi dalam berbagai bentuk (Griffin, 2004).

Tuntutan paradigma *citizen centricity* yang berbeda dengan *government centricity*, merupakan salah satu unsur dalam *connected government*. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(KIP) merupakan mekanisme pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat (*rights to know*). *Beleid* ini menjadi salah satu pendorong disusunnya regulasi dan kerangka kerja manajemen informasi untuk setiap institusi, termasuk di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY). Regulasi *freedom of Information* telah diberlakukan pada beberapa negara yang ada di dunia, hingga akhir tahun 2009 ini terdapat 85 negara yang memiliki regulasi tentang hak masyarakat untuk tahu (*right to know*), termasuk Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sayangnya, regulasi mengenai KIP di Indonesia baru sebatas menjadi aturan untuk mengimplementasikan pengelolaan informasi secara parsial di masing-masing badan publik. Implementasi manajemen informasi di setiap instansi publik, baik Pemerintah, Swasta, atau LSM masih belum banyak. Hanya

beberapa badan publik saja yang mulai memberi perhatian khusus terhadap penyusunan dan pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan informasi untuk memenuhi regulasi tersebut (Fajriyah, 2014).

Manajemen informasi di Pemda DIY setidaknya dipengaruhi oleh pengembangan *e-government* sebagai implikasi dari penerapan Inpres 3/ 2003 yang melahirkan konsep *Jogja Cyber Province* (JCP) dan *Digital Government Service* (DGS) serta kewajiban untuk memenuhi *freedom of information* yang diatur UU No. 14 Tahun 2008. Pemda DIY kemudian membuat Peraturan Gubernur (Pergub) DIY nomor 30 Tahun 2013 tentang manajemen organisasi pengelola informasi dan dokumentasi. Kedua hal diatas menunjukkan bahwa manajemen informasi di Pemda DIY telah didukung dengan teknologi digital dan mempunyai struktur manajemen informasi secara formal.

Praktik manajemen informasi di Pemda DIY masih menyisakan beberapa permasalahan yang cukup kompleks, yaitu: *Pertama*, manajemen informasi adalah proses yang terencana, dimulai dari pengumpulan informasi sampai dengan pemanfaatannya untuk mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi, di Pemda DIY informasi masih digunakan untuk membuat laporan rutin sehingga beberapa pengambilan keputusan kurang didukung oleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terbaru. *Kedua*, informasi di Pemda DIY belum terintergrasikan dengan baik dan bersifat ego sektoral, indikasinya adalah informasi masih dimiliki sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi dengan format yang tidak kompatibel satu sama lain bahkan tidak saling mengacu. Informasi bukan milik bersama atau milik Pemda DIY seperti prinsip data dan informasi dalam *frame work* JCP. *Ketiga*, informasi atau konten belum menjadi prioritas di Pemda DIY, indikasinya adalah banyak konten situs *web* yang tidak diperbarui secara rutin dan staf merasa dibuang bila dipindahkan ke bagian pengolah informasi. *Keempat*, belum ada pejabat di tingkat atas yang menjadi koordinator atau pengatur keseluruhan urusan informasi Pemda DIY. Indikasi: PPID ditafsirkan hanya di tiap instansi, tetapi tidak ada pihak yang mengkoordinasikan secara pengelolaan informasi secara keseluruhan. Di beberapa negara maju dikenal jabatan *government chief information officer* (GCIO). Kondisi ini menimbulkan pengelolaan informasi publik di Pemda DIY belum seperti yang diharapkan seperti konsep teoretik

manajemen informasi. Untuk itu diperlukan alternatif baru sebagai solusi sehingga manajemen informasi di Pemda DIY akan lebih terkoneksi dan terintegrasi. Untuk itu peneliti berargumen bahwa perlu dan penting adanya GCIO untuk mewujudkan manajemen informasi yang efektif serta berbasis *connected government* di Pemerintah DIY

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengkaji urgensi GCIO untuk mewujudkan manajemen informasi berbasis *connected government* di DIY berdasarkan permasalahan yang sedang dialami. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya GCIO dalam proses manajemen informasi di Pemda DIY serta untuk memaparkan dan menguraikan proses manajemen informasi di Pemda DIY.

Menurut Hinton (2006:2-3) manajemen informasi dapat dilihat sebagai proses yang terencana, dimulai dari pengumpulan informasi sampai dengan pemanfaatannya untuk mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Manajemen Informasi bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada *user* yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat (Robertson, 2005). Terdapat 2 (dua) pendekatan manajemen informasi, yakni pendekatan konten (isi) dan pendekatan orientasi teknologi (Schlogl, 2005). Pendekatan yang pertama lebih memfokuskan diri pada informasi dan penggunaannya, yang meliputi manajemen penyimpanan dan manajemen informasi yang berpusat pada manusia. Sementara itu, pendekatan orientasi teknologi meliputi manajemen data, manajemen teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi strategis. Penekanan utama pada pendekatan ini adalah penggunaan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Sementara itu Pawit M. Yusuf (2002) mengemukakan bahwa manajemen informasi lebih mudah dilihat dalam bentuk ilmu perpustakaan, yang secara definitif menggambarkan kegiatan pengelolaan informasi seperti kegiatan menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan atau memanfaatkan informasi serta sumber-sumber informasi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Konsep manajemen informasi memang lebih difokuskan pada proses pengelolaan semua sumber daya informasi yang ada.

Pendapat lain mengenai manajemen informasi adalah suatu proses dan sistem yang kaitannya dengan menciptakan, memperoleh, mengorganisasi, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan

informasi (Detlor, 2009). Tujuannya adalah untuk membantu individu maupun organisasi dalam mengakses dan menggunakan informasi dengan efektif dan efisien. Proses manajemen dapat dianggap sebagai kontrol dari suatu proses untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Oleh karenanya suatu informasi dapat dikelola jika, produksi informasi tersebut dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, hubungan antara informasi dengan target pencapaian organisasi dapat ditampilkan dengan jelas serta dapat diuji secara empiris. Thomas D. Wilson (Detlor, 2009) mendefinisikan manajemen informasi sebagai penerapan prinsip-prinsip manajemen seperti akuisisi, organisasi, kontrol, penyebaran, dan penggunaan informasi yang relevan dengan berbagai kegiatan organisasi. Sementara Choo (2002) memberikan gambaran tentang manajemen informasi sebagai proses manajemen yang terdiri dari tahapan memperoleh, membuat, mengatur, mendistribusikan, dan menggunakan informasi. Informasi dalam konteks organisasi akan mewarnai hal-hal sebagai berikut:

- a) Manajemen informasi melingkupi seluruh aspek informasi dan sumber-sumber informasi guna menjadikannya kekuatan untuk perubahan dan pengembangan organisasi.
- b) Dalam suatu organisasi, manajemen informasi sangat terkait dengan produk informasi, layanan informasi, alur informasi, dan penggunaan informasi.
- c) Efektivitas manajemen informasi bisa didasarkan pada adanya pengaruh yang timbul atas informasi terhadap organisasi

Manajemen informasi bisa dikonsepsikan sebagai studi tentang implementasi prinsip-prinsip manajemen pada bidang atau kegiatan yang terkait dengan akuisisi, organisasi, pengendalian, distribusi informasi, penggunaan informasi, yang semuanya ada dalam lingkup organisasi dengan tekanan pada upaya pengaktifan kinerjanya. Menurut White, manajemen informasi merupakan suatu proses koordinasi yang ekonomis, efektif, dan efisien dari proses produksi, kontrol, penyimpanan, temu kembali, dan penyebaran suatu informasi dari penyimpanan internal maupun eksternal, dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi (Best, 2010)

Terkait dengan Manajemen Informasi, ada beberapa teori yang dapat menjelaskan beberapa hal tersebut, utamanya adalah yang berhubungan dengan data dan pengelolaannya. *Pertama*, sebelum tahun

1970-an pengelolaan informasi sebagian besar terbatas pada file, pemeliharaan file, dan siklus hidup pengelolaan file berbasis kertas, media lain, dan catatan. *Kedua*, dengan perkembangan teknologi informasi, mulai tahun 1970-an, tugas manajemen informasi mengenalkan mekanisme baru, dan juga mulai mencakup bidang pemeliharaan data. Tidak ada lagi hanya pengelolaan file, karena pekerjaan sederhana tersebut dapat dilakukan oleh hampir semua orang. Pemahaman tentang teknologi yang digunakan, dan teori yang mendukung aktifitas tersebut menjadi penting. Perkembangan ini mendasari bahwa penyimpanan informasi telah bergeser dari cara non elektronik menjadi cara elektronik, sehingga aktivitas ini memerlukan keahlian yang berbeda. *Ketiga*, Pada akhir 1990-an ketika informasi secara teratur disebarluaskan melalui jaringan komputer dan dengan cara elektronik lainnya, maka peran manajer informasi menjadi cukup penting. Peran dan tugas manajer informasi menjadi semakin kompleks, karena ditambah dengan pengelolaan *hardware* dan *software*. Dengan alat terbaru yang tersebut, manajemen informasi telah menjadi sumber daya yang penting untuk kepentingan organisasi. Penggunaan informasi dan teknologi dikalangan pemerintah yang di sebut *e-government*, saat ini telah berkembang menjadi konsep pemerintahan yang terkoneksi atau disebut *connected government*. Konsep ini merupakan kontribusi dari teori manajemen informasi yang dikemukakan oleh Hinton dan Robertson

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguraikan prinsip-prinsip dan juga kerangka manajemen informasi. Salah satu model yang cukup banyak dijadikan rujukan dalam tulisan-tulisan mengenai manajemen informasi adalah model yang dikembangkan Choo dengan lingkaran kegiatan manajemen informasi yang terdiri atas 6 (enam) hal sebagai berikut (Joyce Kirk, 1999): *pertama*, identifikasi kebutuhan informasi, yang dibatasi oleh situasi dan tuntutan subjek pokok; *kedua*, akuisisi informasi, yang meliputi evaluasi sumber-sumber mutakhir, assesmen sumber-sumber baru, dan mencocokkan sumber-sumber sesuai dengan kebutuhan; *ketiga*, organisasi informasi dan penyimpanan memori organisasi atau pengetahuan dan keahlian-keahlian seseorang; *keempat*, produk-produk dan layanan informasi yang diperoleh guna mencapai kualitas informasi; *kelima*, distribusi informasi melalui berbagai cara dan kesempatan baik secara formal maupun informal; dan *keenam*,

penggunaan informasi baik dalam kreasi maupun aplikasi informal untuk penunjang pembuatan keputusan organisasi.

Sedikit berbeda dengan apa yang telah dikembangkan Choo, proses manajemen informasi yang dideskripsikan oleh Wilson (Maceviciute & Wilson, 2005) tidak memasukan unsur penggunaan informasi. Menurutnya proses penciptaan atau pembentukan informasi serta penggunaan informasi adalah hal yang berada diluar proses manajemen informasi namun masih dalam satu lingkaran siklus hidup informasi. Wilson memaparkan 6 (enam) proses dalam manajemen informasi yang terdiri dari: (a) akuisisi, (b) organisasi, (c) penyimpanan, (d) temu kembali, (e) akses, (f) diseminasi informasi. Informasi dalam hal ini mengacu pada semua jenis informasi yang memiliki nilai, baik itu yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasinya termasuk didalamnya adalah sumber daya data yang dimiliki suatu organisasi. Siklus manajemen informasi berkaitan erat dengan nilai informasi itu sendiri, kualitas informasi, kepemilikan, penggunaan dan keamanan informasi dalam konteks kinerja organisasi.

Kepemimpinan informasi atau disebut *Chief Information Officer* (CIO) serta *Government CIO* (GCIO) dalam sektor publik merupakan bagian sentral dan pokok dalam manajemen informasi. Menurut Garcia dan Moyano (2007) kepemimpinan yang dibutuhkan di era informasi dan teknologi atau e-government ini setidaknya bercirikan: (1) memiliki komitmen yang kuat untuk efisiensi dalam menyelesaikan masalah publik sekaligus mampu menekan interes personal; (2) memiliki pemahaman dan apresiasi tinggi terhadap teknologi informasi; dan (3) mampu mengintegrasikan semua urusan publik dalam satu kesatuan sistem

Electronic Data Systems Corporation (2008) menuliskan, profesi pertama CIO di dunia tidak dapat diketahui atau *lost to history*. CIO sebagai suatu profesi dapat dipahami dari posisi tugas dan fungsi jabatan yang diemban seseorang. Diperkirakan pengadaaan CIO pertama kalinya terjadi di perusahaan-perusahaan pada tahun 1970 yang bertepatan dengan beralihnya manajemen informasi non elektronik menjadi pengelolaan informasi elektronik. Sebagaimana teknisi perusahaan, CIO pertama ini melaksanakan tanggungjawabnya dengan pendekatan teknis, seperti mengoptimalisasi akuisisi, integrasi, dan aplikasi teknologi informasi. Pada tahun-tahun tersebut CIO belum memiliki visi, namun seiring

dengan perkembangan informasi elektronik maka posisi CIO berkembang dengan memiliki tanggungjawab yang multidimensional (EDS, 2008).

The CIO role emerged in the 1970s and is typically held by a small group of people or an individual, close to the senior management of the company (Gottshalk and Taylor 2000).

Eksistensi CIO pada tahun 1996 telah tercantum dalam *Clinger Cohen Act* (CCA). CCA merupakan kombinasi perundang-undangan *Information Technology Management Reform Act* (ITMRA) dan *Federal Acquisition Reform Act* (FARA) yang disahkan pada tahun 1996. CIO di sektor pemerintahan selanjutnya disebut sebagai GCIO. Pembentukan Jabatan GCIO terdapat pada Departemen, Agensi, dan Badan Nasional Pemerintah Federal Amerika Serikat. *National Defense Authorization Act* 1996, dalam *Division E* telah diatur Penyempurnaan Manajemen Teknologi Informasi pada Departemen Pertahanan, dan Departemen Energi USA. Didalamnya antara lain mengatur tentang tanggungjawab akuisisi teknologi informasi dan agensi GCIO. Tanggung jawab akuisisi terdiri dari pengaturan tanggung jawab direktur, perencanaan anggaran, dan kendali investasi, basis kinerja dan hasil. Pengaturan agensi GCIO terdiri dari desain GCIO, tanggung jawab umum, kewajiban dan kualifikasi GCIO, definisi arsitektur teknologi informasi.

Pada tahun 2002 diterbitkan "*E-Government Act*" yang didalamnya banyak mengatur tentang peran CIO di sektor Pemerintahan. Jika GCIO pada departemen sebagai agensi GCIO, maka di Pemerintahan Federal USA dikenal Dewan GCIO (*GCIO Council*) yang diantaranya beranggotakan Direktur Deputy Manajemen, Administrator *E-Government*, Administrator Informasi dan Regulasi, CIO dari masing-masing agensi, GCIO CIA, dan GCIO Departemen Pertahanan. Secara umum peran dari GCIO adalah *Pertama*, menyelaraskan manajemen, strategi bisnis, reformasi birokrasi (Auffret and Estevez, 2010) dengan investasi teknologi dan informasi (Marzuki, 2009); *Kedua*, memimpin penyediaan informasi (OECD, 2003), manajemen (Pratomo and Singgih, 2008), melakukan operasional rutin (Nugraha, 2008), efisiensi, dan evaluasinya melalui pemanfaatan informasi dan teknologi; *Ketiga*, memastikan terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola (UN, 2012);

Keempat; menyusun dan koordinator rencana strategis (Varavithya and Esichaikul, 2003), manajemen proyek teknologi dan informasi, dan standarisasi *e-Government* (US, 1996; Pratomo and Singgih, 2008); *Kelima*, melakukan manajemen SDM pengelola informasi dan teknologi (US, 1996); *Keenam*, sebagai juru bicara dan penghubung ke satuan kerja lainya termasuk satuan kerja pengelola informasi (Varavithya and Esichaikul, 2003); *Ketujuh*, memunculkan kemampuan-kemampuan baru melalui *information governance*; dan *kedelapan*, mendeliver pelayanan yang akurat, cepat, dan *user friendly* (Pratomo and Singgih, 2008; Nugraha, 2008; Ilham, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melakukan pengkajian terhadap data obyektif, baik primer maupun sekunder sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai jenis penelitian model terapan (Sugiyono, 2000). Penelitian yang akan dilakukan ini adalah bersifat deskriptif analistis (Whyte, 1943), karena berusaha untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil observasi, *indepth interview*, *focus group discussion* (FGD), data dokumentasi, dan studi kepustakaan

Lokasi Penelitian ini adalah di kompleks Kepatihan Pemda Provinsi DIY. Teknik Pengambilan Datanya adalah: 1). Pengumpulan data primer yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan FGD dengan informan dan partisipan yaitu: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (OPID), Biro Umum, Humas, dan Protokol (Biro UHP), Biro Hukum, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah (BPAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pengelola Portal *citizen centricty* (jogjaprov.go.id), Pengelola Plaza Informasi, dan Pengelola DGS yang diwakili Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan BKPM), kemudian yang mewakili masyarakat adalah Komisi Informasi Daerah DIY, perwakilan dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Peneliti Manajemen Informasi di Bank Indonesia, Akademisi UGM dan UAD, 2). Pengumpulan Data Sekunder dengan cara studi *literature* dan bahan-bahan dari dokumentasi atau kepustakaan media untuk mengetahui proses perencanaan dan kondisi eksisting manajemen informasi Pemda DIY.

Data yang diperoleh, dikumpulkan, diedit, dan dikategorikan, serta dicari kesesuaian (penjodohan) polanya untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu deskripsi, maka analisis dilakukan dengan jalan mengaitkan kategori dan data ke dalam kerangka yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka selanjutnya dipaparkan kondisi manajemen informasi di Pemda DIY saat ini, permasalahan yang dialami dalam pengelolaan informasi di Pemda DIY, serta peran GCIO sebagai faktor penting pengelolaan informasi yang efektif.

Kondisi Eksisting Manajemen Informasi Pemda DIY

Diterbitkannya regulasi mengenai kebebasan memperoleh informasi publik pada tahun 2008 melalui UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diimplementasikan 2 tahun setelah diundangkan yaitu pada tahun 2010, kemudian Pergub DIY No. 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi & Dokumentasi. Kedua *beleid* tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menjelaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan melayani kebutuhan permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Pemda DIY dituntut untuk wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi di lingkungannya masing-masing. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Pemda DIY melalui SK Gubernur No. 302/KEP/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah diharuskan untuk menunjuk Pejabat (PPID) untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi. Pemda DIY juga mempunyai Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi *Digital Government Service* (TiMPII-DGS) adalah sebuah gugus tugas yang mempunyai fungsi untuk melakukan percepatan dan terobosan transformasi layanan yang berorientasi *citizen centricty* dengan berbasis pada proses bisnis informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan *e-government* sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif. TimPII-DGS dibentuk dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 22/Tim/2007.

Beberapa regulasi di atas memberikan arahan mengenai faktor penting dalam manajemen informasi di Pemda DIY. Namun demikian, proses dan kerangka kerja pengelolaan informasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap institusi memang tidak secara

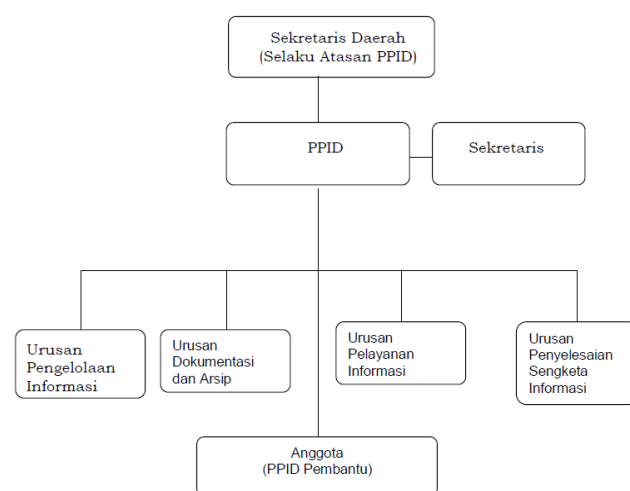
eksplisit digambarkan dalam regulasi tersebut. Oleh karenanya proses pengelolaan informasi pada Pemda DIY hingga saat ini masih dikerjakan sendiri-sendiri, diserahkan pada masing-masing unit kerja yang ada. Sebagai salah satu contoh kasus untuk PPID, hampir sebagian besar menempatkan PPID dari atau pada bagian Informasi atau Hubungan Masyarakat (Humas) namun untuk pengelolaan informasinya tetap diserahkan pada satuan kerja masing-masing, tidak dibentuk unit khusus untuk mengelola informasi, serta tidak ada kerangka pengelolaan informasi yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi unit kerja yang bersangkutan.

Tugas Pemda DIY dalam melakukan pelayanan informasi PPID yaitu: *Pertama*, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; *Kedua*, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; *Ketiga*, melakukan verifikasi bahan informasi publik; *Keempat*, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; *Kelima*, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan *Keenam*, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. sementara kewenangan PPID Pemda DIY adalah untuk: *Pertama*, menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; *Ketiga*, mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; *Keempat*, menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan *Kelima*, menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Portofolio informasi Pemda DIY merupakan pengelompokan informasi yang menggambarkan ketersediaan informasi yang ada di Pemda DIY, disusun berdasarkan kebutuhan informasi untuk mendukung pelayanan informasi publik Pemda DIY. Pelayanan informasi Pemda DIY terklasifikasi dalam lima jenis informasi publik, yaitu: *Pertama*, Informasi tersedia dan diumumkan berkala. Kategori informasi ini memuat antara lain tentang: informasi profil pemda DIY, ringkasan informasi tentang program,

kegiatan, kinerja, laporan keuangan, peraturan atau kebijakan publik, pengumuman pengadaan barang dan jasa serta informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat. *Kedua*, Informasi setiap saat, kategorisasi informasi ini memuat tentang daftar informasi publik yang disediakan Pemda DIY, informasi surat menyurat pejabat Pemda DIY, syarat perizinan, informasi mengenai data perbendaharaan atau inventaris, rencana strategis Pemda DIY, informasi mengenai pelanggaran dan penindakannya, serta informasi mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemda DIY. *Ketiga*, Informasi serta merta, yang berisi mengenai data Gempa DIY dan sekitarnya. *Keempat*, Informasi atas permintaan, Pemda DIY menyajikan 32 jenis atau bidang informasi yang siap diminta, misalnya terkait bidang Pendidikan, informasi yang bisa diminta adalah terkait dengan manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. *Kelima*, Informasi dikecualikan berisi informasi yang dikecualikan Pemda DIY yaitu informasi publik yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam UU KIP.

Information Stewardship di Pemda DIY adalah pembagian peran dan tanggung jawab setiap bagian pada saat melakukan proses pengelolaan informasi. Di Pemda DIY dinamakan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi seperti yang terlihat dari gambar 1.



Gambar 1 Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari : a). Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID, b). Sekretaris, c). Urusan Pengelolaan

Informasi, d). Urusan Dokumentasi dan Arsip, e). Urusan Pelayanan Informasi, f). Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi, dan g). Anggota (PPID Pembantu).

Pada tingkat unit kerja disebut Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, yang terdiri dari: a). Kepala SOPD selaku Atasan PPID Pembantu, b). PPID Pembantu, c). Sekretaris, d). Urusan Pengelolaan Informasi, e). Urusan Dokumentasi dan Arsip, f). Urusan Pelayanan Informasi, g). Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi, dan h). Anggota.

Kerangka operasional penatalayanan informasi Pemda DIY merupakan suatu rangkaian proses dalam mengelola informasi dan terdiri dari pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi, pelayanan informasi, dan penyelesaian sengketa informasi. Seluruh tugas yang tercantum dalam kerangka operasional ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan setiap Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Pengumpulan informasi, tahapan ini berisi kegiatan berupa mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerja masing-masing, kemudian mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya, mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan, serta membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

Pengklasifikasian informasi, tahapan ini berisi kegiatan proses pengklasifikasian informasi, yaitu harus membagi informasi menjadi kelompok, a). informasi yang bersifat publik dan b). informasi yang dikecualikan. Pendokumentasian informasi, tahapan ini berisi: a). deskripsi Informasi, dengan membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi, b). verifikasi Informasi, dengan memverifikasi informasi sesuai dengan jenis kegiatannya, c). otentikasi Informasi agar terjamin keaslian informasi melalui validasi informasi, dan d). pemberian kode informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan melalui metode pengkodean yang ditentukan oleh masing-masing unit kerja. Pelayanan informasi, PPID dan SOPD memberikan pelayanan informasi publik melalui pengumuman, permohonan atau secara langsung dan penyelesaian sengketa informasi, sengketa informasi timbul jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atas penolakan PPID untuk memberikan informasi publik.

Permasalahan Pengelolaan Informasi Pemda DIY

Sejak tahun 2011 Pemda DIY membangun Portal yang berorientasi pada “publik”, beralih dari portal yang lama, yang masih berpihak pada *government centricty*. Portal adalah induk dari semua website yang ada di masing-masing instansi Pemda DIY. Konsep integrasi dan keberpihakan pada masyarakat adalah salah satu implementasi manajemen informasi pada pengelolaan Portal. Namun sayang menurut pengelola Portal pengumpulan, pengelolaan, dan diseminasi informasi masing-masing instansi masih bersifat parsial dan cenderung mementingkan satuan kerjanya masing-masing:

...Dalam prakteknya setiap instansi memiliki website masing-masing dan cenderung lebih mengutamakan websitenya sendiri, sehingga mengabaikan portal DIY...idealnya, perlu ada perbaikan pengumpulan informasi, sehingga tidak menjadi silo system.

Selain permasalahan ego sektoral seperti statemen di atas, partisipan FGD juga menyatakan:

....fungsi integrator informasi dijalankan oleh banyak instansi diantaranya yaitu: plasa informasi, LTMI. Sehingga terjadi tumpang tindih tupoksi.....Benturan kewenangan antara PPID dengan Pimpinan unit kerja dalam pengendalian pengelolaan informasi

Permasalahan lain yang ditemui mengenai pembuatan keputusan yang belum didukung oleh informasi yang valid.

...Saat ini data yang ada masih sangat bervariasi, misalnya data jumlah penduduk berbeda-beda, tergantung instansi yang mengelolanya. Informasi yang disediakan oleh BPS, BKKBN, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk pembuatan keputusan akan menyebabkan distorsi yang cukup lebar...

Begitu juga dengan permasalahan manajemen data yang tumpang tindih, seperti diungkap oleh informan:

...Masih terdapat duplikasi dan redundansi data yang berasal dari beberapa instansi, misalnya jumlah penduduk pra-sejahtera yang dapat berasal dari BPS, Dinas Sosial, BKKBN. Karena kriteria di masing-masing satuan kerja berbeda, maka jumlah penduduk pra-sejahtera ini juga tidak sama, sehingga sulit untuk digunakan sebagai

dasar pembuat keputusan oleh para pengambil kebijakan.

Beberapa temuan di lapangan seperti dipaparkan diatas, memperlihatkan bahwa manajemen informasi saat ini di Pemerintah DIY belum berjalan efektif. Manajemen informasi yang efektif akan meningkatkan kualitas layanan informasi serta memuaskan *customer* (Detlor; 2010). Untuk menuju posisi tersebut maka dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang mampu mengelola sumber daya informasi untuk menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas Wacker (2008). Kepemimpinan informasi (GCIO) membutuhkan beberapa prasyarat untuk mewujudkan efektivitas manajemen informasi. Prasyarat tersebut, meliputi: kelembagaan unit manajemen informasi (Schware; 2005), aplikasi terintegrasi informasi dan teknologi (Choo; 2008) yang menyatakan bahwa teknologi informasi sangat penting berperan untuk pengelolaan informasi dalam organisasi. Kerangka operasional manajemen informasi (Wilson; 2005) serta komitmen *connected government* (Pardo & Burke; 2009).

1. Kelembagaan

Schware (2005) menyimpulkan banyak negara telah gagal dalam usaha untuk mengimplementasikan manajemen informasi dalam program *e-Government*. Hal ini terutama karena mereka tidak memiliki mekanisme kelembagaan yang memadai sehingga mampu mengimplementasikan program secara efektif, mampu melakukan evaluasi, dan adaptasi yang terus-menerus. Meskipun lembaga memainkan peran menentukan dalam perumusan dan implementasi strategi manajemen informasi, tetapi sering diperlakukan sebagai faktor tambahan. Setelah Badan Informasi Daerah DIY sebagai *leading sector* pengelolaan informasi dan teknologi di Pemda DIY dilebur, kemudian fungsi komunikasi dan informatikanya digabungkan pada Dinas Perhubungan sehingga menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY. Penggabungan ini membuat program pengelolaan informasi dan teknologi agak meredup. Serta efektivitas manajemen informasi di Pemda DIY mulai dipertanyakan. Sejalan dengan hal itu untuk menjamin pengelolaan informasi dan teknologi supaya efektif perlu dirumuskan kembali bentuk kelembagaan manajemen informasi yang berfungsi sebagai penggerak transformasi dan inovasi dalam pelaksanaan *e-government*, serta

diperlukan juga adanya pembagian tugas koordinasi yang jelas antar dinas dan instansi.

2. Aplikasi informasi

Choo (2008) menyatakan bahwa aplikasi teknologi informasi sangat penting berperan untuk pengelolaan informasi dalam organisasi, sedangkan manajemen teknologi informasi harus menjadi bagian integral dari rencana manajemen informasi. Aplikasi teknologi informasi memfasilitasi kemampuan untuk mendukung terciptanya informasi, pengambilan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan secara efisien dan efektif. Belum adanya manajemen dokumen, data dan file secara terpadu dan bersama-sama di Pemda DIY membuat masih terjadinya kesulitan dalam pengelolaan dokumen kearsipan, pemborosan sumber daya, terutama koneksi internet dan kapasitas penyimpanan (*harddisk*), sehingga mengakibatkan terlambatnya penyiapan informasi strategis yang akan digunakan untuk pembuatan keputusan. Kebutuhan data dan informasi untuk pembuatan keputusan di Pemda DIY belum didukung oleh berbagai aplikasi informasi secara terpadu. Salah satu sebabnya adalah masih tersebarannya berbagai dokumen dan data di berbagai dinas dan instansi. Fakta dilapangan menunjukkan diperlukannya sebuah sistem aplikasi informasi berbasis teknologi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data dan informasi di antara para penyedia dan pemanfaat informasi secara mudah, murah, dan aman.

3. Kerangka operasional

Wilson (2003) memaparkan 6 (enam) proses dalam kerangka manajemen informasi yang terdiri dari: (a) akuisisi, (b) organisasi, (c) penyimpanan, (d) temu kembali, (e) akses, (f) diseminasi informasi. Informasi dalam hal ini mengacu pada semua jenis informasi yang memiliki nilai, baik itu yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasinya termasuk didalamnya adalah sumber daya data yang dimiliki suatu organisasi. Siklus manajemen informasi berkaitan erat dengan nilai informasi itu sendiri, kualitas informasi, kepemilikan, penggunaan dan keamanan informasi dalam konteks kinerja organisasi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi & Dokumentasi, kerangka operasional manajemen informasi di Pemda DIY meliputi aktivitas

pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi, pelayanan informasi, dan penyelesaian sengketa informasi. aktivitas ini sebenarnya sudah mencerminkan kerangka operasional manajemen informasi yang efektif, akan tetapi dalam pelaksanaannya kerangka operasional ini tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya komitmen yang berpihak kepada pelaksanaan aturan tersebut dan *information stewardship*-nya tidak fokus, dikarenakan mempunyai tugas dan fungsi primer sebagai pegawai pemerintah di satuan kerja masing-masing.

4. Komitmen *connected government*

Connected government adalah sebuah inovasi yang diwujudkan untuk menuju tahapan transformasi, tetapi tidak mudah untuk mengartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan *connected government* serta implikasi-implikasi yang timbul dalam sebuah organisasi pemerintahan. Merujuk kepada praktek yang ada saat ini dan pemaparan yang ada didalam literatur, *connected government* diharapkan menyertakan sejumlah karakteristik, yang meliputi: *citizen centricity, common infrastructure and interoperability, collaborative services and business operations; public sector governance, networked organizational model; social inclusion*, serta *transparent and open government*. Dalam transisi menuju "*connected government*", semua entitas pemerintahan harus melewati 4 tahapan, yang utama adalah kematangan dan kapabilitas sistem *e-government*-nya. Setiap tahapan mencerminkan sebuah kontinum transformasi pemerintah ke level yang lebih tinggi. Empat tahapan yang digunakan secara luas di seluruh dunia adalah; tahap 1 keberadaan situs web; tahap 2 web yang interaktif; tahap 3 situs web yang dapat digunakan untuk transaksi, dan tahap 4 adalah transformasi elektonis ke dalam sistem pemerintahan.

Pemda DIY mempunyai komitmen yang baik dalam mewujudkan *connected government*, ini dibuktikan dengan orientasi *citizen centricity* dalam manajemen informasi berbasis elektronik. Caranya adalah dengan melakukan perubahan orientasi dalam pengembangan portal informasinya, dari semula yang bersifat *government centric* menjadi berorientasi *citizen centric*. Pengembangan portal layanan Pemda

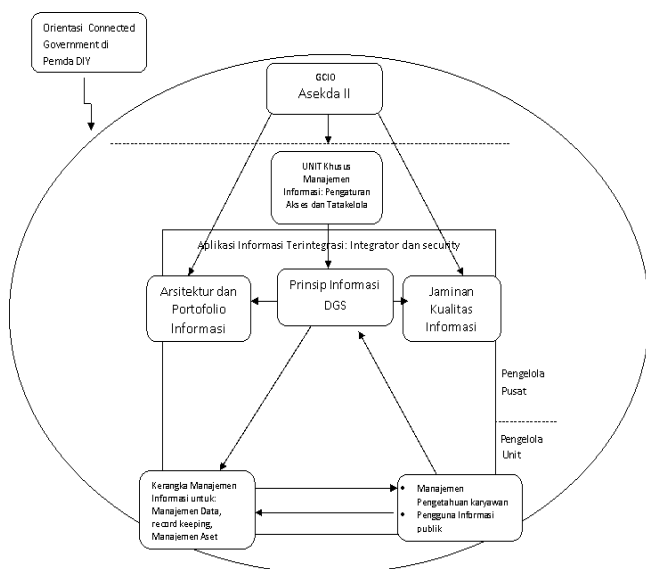
DIY dengan pendekatan *citizen centric* dibangun atas prinsip *life event* yang merupakan rangkaian peristiwa atau siklus kehidupan yang dialami oleh seorang manusia. *Life event* model membagi siklus hidup manusia atas fase: kelahiran, pendidikan, bekerja, menikah, kesehatan, rekreasi dan olah raga serta kematian. Masing-masing fase dikembangkan menjadi sebuah format layanan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Portal *citizen centric* beralamat di url <http://www.jogjaprovo.go.id/> (Egaravanda, 2011).

GCIO sebagai Faktor Kunci Manajemen Informasi yang Efektif

Pada saat kondisi lingkungan berubah cepat di era *e-Government*, kemudian menjadi *connected government*, transformasi kepemimpinan dari model kepemimpinan yang tidak responsif, paternalistik, dan birokratis ke model kepemimpinan yang berorientasi pada pengguna jasa, fleksibel, berorientasi kualitas, dan responsif sangat diperlukan (Purbokusumo dan Utomo; 2009). Ini dikarenakan *e-Government* merupakan paradigma yang secara ekstrim berbeda strukturnya dengan struktur birokrasi tradisional. Prasyarat dasar bagi penerapan model kepemimpinan di era ini adalah: (1) ketersediaan sumberdaya teknologi informasi seperti *bandwidth*, jaringan informasi, server dan personal komputer, serta aplikasi pengolah informasi terkait; (2) ketersediaan beberapa staf seperti *webmaster*, ahli jaringan, *admin server*, teknisi, dan *programmer*; (3) adanya ahli manajemen informasi dan kebijakan sebagai ahli yang mampu menerjemahkan otoritas dan kewenangan organisasi publik dalam aplikasi teknis dalam pengelolaan informasi.

Rubino-Hallman dan Hanna (2006), yang menyatakan bahwa transformasi *e-government* menuju *connected government* berbasis manajemen informasi yang terkoneksi adalah sebuah perubahan besar yang disertai dengan revolusi manajerial serta kelembagaan dan proses reformasi administrasi yang difasilitasi oleh teknologi. Untuk itu diperlukan para pemimpin yang kompeten dalam memberdayakan fungsi kelembagaan untuk mengatasi hambatan sebagai proses dan perubahan organisasi, memprioritaskan dan mengelola investasi yang rumit, keterampilan dan mengubah *mind-set*, koordinasi di berbagai lembaga dan portofolio proyek, menghindari duplikasi usaha, pengaruh skala ekonomis, dan mempertahankan visi transformasi jangka panjang

dibanding bersikeras pada hasil jangka pendek. Pendapat Hanna dan Hallman tersebut akan memperkuat argumen peneliti berdasarkan data lapangan. Ke-4 aspek diatas akan menjadi prasarat dari pentingnya GCIO di Pemda DIY, tanpa ke-empat hal tersebut maka keberadaan information leadership menjadi tidak efektif. Dukungan 4 aspek diatas serta relasinya dengan keberadaan GCIO dimodelkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Model Manajemen Informasi menuju *Connected Government*

GCIO adalah pejabat yang bertugas untuk mengelola seluruh sumber daya informasi di Pemda DIY. Tugasnya untuk memastikan bahwa informasi yang bersifat publik dapat tersedia secara luas dan dapat diakses secara mudah oleh karyawan Pemda DIY maupun masyarakat dan informasi yang bersifat rahasia dapat terlindungi kerahasiaannya. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, GCIO perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi, karena teknologi itulah yang paling sesuai untuk menunjang tugasnya.

Jeff Wacker menyebutkan bahwa kesuksesan GCIO dapat dicapai dengan cakupan multidimensi peran kepemimpinan informasi, sebagai: integrator informasi, inovator, mengatasi permasalahan, identitas organisasi, pemberi semangat, mampu menjaga hubungan dengan pihak luar, mampu menginvestigasi, dan manajer informasi, sementara peran yang harus dihindarkan adalah bagaimana manajer informasi tersebut tidak terjebak didalam kelambanan, melemahkan, dan tidak efisien (Eka, 2012). Kewenangan pemimpin pengelola informasi pada setiap organisasi memiliki perbedaan, tetapi pada

umumnya GCIO memiliki peran dan tanggungjawab menyeluruh terhadap manajemen informasi.

Fokus utama GCIO adalah membentuk karakter strategis dalam sistem perencanaan manajemen informasi pada sistem organisasi. Tanggungjawab yang ada meliputi aspek teknik dan lingkup organisasional. Perhatian utama peran manajer tertinggi bidang informasi adalah menyesuaikan kepentingan *information technology and business* diantaranya yakni bagaimana sistem informasi dapat mendukung bisnis organisasi, memutuskan investasi, menggunakan sistem apa yang diprioritaskan dalam akuisisi teknologi, sistem penilaian kualitas dan peningkatan sistem informasi, aspek keamanan, *performance, reliability, integrability, and maintainability*.

GCIO atau kepemimpinan informasi menjadi unsur penting dalam upaya implementasi manajemen informasi sehingga bisa diterima oleh seluruh unit kerja di Pemda DIY. Yulk mengatakan bahwa suatu perubahan dalam organisasi dapat diterima dengan peran kepemimpinan dalam menyusun visi dan strategi masa depan untuk perubahan tersebut, mengkomunikasikan dan menjelaskan visi, serta motivasi dan inspirasi pada orang lain untuk mencapai visi tersebut (Annisa, 2014). Mengawal dan mempermudah proses perubahan dalam suatu organisasi merupakan salah satu tanggung jawab kepemimpinan. Kecenderungan untuk menolak suatu perubahan akan selalu ada. GCIO Pemda DIY haruslah merupakan pimpinan yang begitu peduli dan paham akan aktivitas manajemen informasi. Upaya-upaya pendekatan dan pemahaman secara langsung terus dikomunikasikan pada berbagai kesempatan baik itu forum formal maupun informal. Upaya semacam inilah yang menjadikan TiMPII-DGS akan menjadi kewenangan tambahan GCIO sebagai pengungkit yang dinilai dapat memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap Pemda DIY khususnya bidang penataan dan pengelolaan data informasi.

GCIO sebagai manajemen tertinggi dalam manajemen informasi di Pemda DIY, menurut mayoritas narasumber FGD, idealnya dijabat secara *ex officio* oleh Asisten Sekretariat Daerah (Asekda) II. GCIO juga merupakan gabungan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pemimpin Induk dari Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, fungsi TiMPII-DGS akan lebih baik menjadi salah satu perluasan tugas dan fungsi GCIO. Salah satu tugas prioritas dari GCIO adalah

menetapkan Arsitektur Informasi Pemda DIY dan menetapkan bahwa informasi seluruh unit kerja merupakan Informasi milik Pemda DIY, ini sejalan dengan prinsip data dan informasi dalam *frame work* DGS. Arsitektur informasi merupakan kerangka dasar pengelolaan informasi, dibuat sebagai arah atau panduan dalam perencanaan dan pengembangan informasi untuk memastikan agar seluruh informasi yang ada dalam ruang lingkup pengelolaan informasi Pemda DIY dapat terintegrasi. Arsitektur informasi Pemda DIY dibuat searah dengan portofolio informasi yang sesuai dengan aplikasi informasi berbasis elektronik yang terintegrasi. Semua elemen ini akan memastikan seluruh informasi di Pemda DIY terkoneksi sehingga memudahkan dalam hal navigasi dan pelayanan informasi. Arsitektur Informasi ini meliputi portofolio, model, aplikasi informasi berbasis teknologi. Penyusunan ketiganya dikoordinasikan oleh unit yang dibentuk khusus untuk menangani manajemen informasi di Pemda DIY, unit ini akan dilekatkan fungsinya ke dalam tugas dan fungsi Biro UHP, sehingga menjadi Biro Umum, Manajemen Informasi dan Protokol (UMP). Biro ini akan mengelola aplikasi informasi dan berkoordinasi bersama unit kerja lainnya dalam penerapan manajemen informasi Pemda DIY. Masing-masing unit kerja, Dinas, dan instansi mempunyai kerangka manajemen informasi sesuai Peraturan Gubernur 30/2013, serta mempunyai *information stewardship* yang khusus menangani pengelolaan informasi. GCIO menjadi faktor penentu dalam manajemen informasi, apalagi jika ingin menerapkan *connected government*. Pemda DIY sudah memulai inisiatif untuk orientasi menuju pemerintahan terkoneksi tersebut, langkah selanjutnya adalah membentuk GCIO serta prasyarat yang lain.

KESIMPULAN

Manajemen informasi di Pemda DIY saat ini belum menunjukkan derajat yang cukup efektif. Hal ini terjadi karena, *pertama* relasi antar organisasi pengelola informasi dan unit kerja yang terlibat dalam manajemen informasi Pemda DIY berbasis *connected government* secara keseluruhan belum terstruktur dengan baik, utamanya di level kelembagaan unit pusatnya. *Kedua*, belum adanya kepemimpinan informasi dan unit khusus yang berfungsi sebagai top manajemen dan wadah yang memayungi serta memadukan seluruh unit kerja yang terlibat dalam Manajemen Informasi di Pemda

DIY. Padahal aktivitas terkait pengelolaan informasi haruslah terintegrasi, kemudian harus ada kebijakan informasi terintegrasi dengan kebijakan pengembangan institusi Pemda DIY dan diprioritaskan. Ini dikarenakan sifat informasi yang harus bisa mengalir bebas lintas unit organisasi serta informasi tidak hanya masuk dari internal Institusi tetapi juga berasal dari eksternal Pemda DIY. Untuk itu diperlukan GCIO yang akan mengkoordinasikan seluruh aktivitas manajemen informasi di Pemda DIY.

Implementasi manajemen informasi Pemda DIY yang terkoneksi dan terintegrasi maka harus dilakukan melalui beberapa tahapan dari persiapan sampai dengan tahap pengembangan. Langkah-langkah yang diusulkan dalam tahap pengembangan yaitu: (1). Perluasan fungsi Assekda II dengan menambahkan fungsi CIO, Kordinator TiMPIO-DGS, dan PPID. (2). Perluasan fungsi Biro Umum, Humas, dan Protokol dengan menambahkan fungsi manajemen informasi. (3). Pembuatan model aplikasi terintegrasi antar unit pusat dan masing-masing unit kerja. (4). Menetapkan prosedur manajemen informasi sesuai dengan tujuan *connected government*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Achmad Djunaedi, MUP dan Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP yang membimbing penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, E. (2010). Urgensi Penciptaan *Chief Information Officer* (CIO) Pemerintah Dalam Mendukung Impelementasi E-Government Indonesia, Makalah Seminar MTI UGM.
- Auffret, JP, and Estevez, E. (2010). "Developing a GCIO System: Enabling Good Government through E-Leadership." *ACM Proceedings of the 11th*. <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1809892>.
- Bappeda DIY. (2013). Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika
- Choo, C. W. (2002). *Information management for the intelligent organization: The art of environmental scanning (3rd Ed.)*. Medford, NJ: Learned Information.
- Detlor. B., (2010), "Information Management", *International Journal of Information Management*, hal.103-108.
- Egaravanda, S. (2009). Transformasi Pelayanan Publik Melalui Portal Pemerintah Daerah Provinsi DIY Dengan Pendekatan *Citizen Centric*. Thesis, UGM
- Estevez, E, Janowski, T., Marcovecchio, I., and Ojo, A. (2011). "Establishing Government Chief Information Officer Systems." In *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government*

- Research Conference on Digital Government Innovation in Challenging Times - Dg.o '11*, 292. New York, New York, USA: ACM Press. Doi:10.1145/2037556.2037603 Griffin, R. W., 2004, *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- EU. 2012. "eGovernment in Sweden" European Union
- Maceviciute, E. and Wilson, T. D., 2005. "The development of the information management research area", *Information Research*, Vol.7, No.3 <<http://InformationR.net/ir/7-3/paper133.html>> (diakses pada 5 Mei 2014).
- Fajriyah, A., (2015). *Manajemen Informasi Bank Indonesia*. Thesis, UGM
- Garcia, J.R.G., dan Moyano, I.J.M. (2007), *Understanding the evolution of e-Government: The influence of systems of rules on public sector dynamics*, *Government Information Quarterly*, Vol. 24, pp. 266-290.
- Ha, H., and Coghill, K. (2008). "E-Government in Singapore - A SWOT and PEST Analysis." *Asia-Pacific Social Science Review* 6 (2): 103–30. doi:10.3860/apssr.v6i2.62.
- Harimurti, A., Djunaedi, & Kumorotomo. (2015). Model Manajemen Informasi untuk mewujudkan *Connected Government*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 6, No.1 Juli 2015.
- Hinton, M. (2006). *Introducing Information Management: The Business Approach*. Elsevier & The Open University, Amsterdam.
- Ilham, P. (2015). *Pemodelan Kedudukan GCIO di Indonesia*, *Jurnal IPTEKKOM* Juni 2015
- Liu, Simon, and Hwang, J.D., (2003). "Challenges to Transforming IT in the US Government," no. June: 10–15.
- Middleton, M. (2006). "A Framework for Information Management: using case studies to test application", *International Journal of Information Management*.
- OECD. (2003). "The Case for E-Government : Excerpts from the (OECD) Report The E-Government Imperative." *OECD Journal on Budgeting* 3 (1): 1987–96.
- OECD. (2012). *Advancing Indonesian Local E-Government*. Seoul, Republic of Korea: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pratomo, S. A. (2008). "Analisis Pengaruh Konteks Organisasional Terhadap Peran Strategis Chief Information Officer." Universitas Gajah Mada.
- Purbokusumo & Prasetya. (2009). *Kepemimpinan Entrepreneur di Era e-Government*, Tulisan didedikasikan untuk pengabdian, Prof. Dr. Warsito Utomo
- Schware, R. & Deane, A. (2003). "Deploying e-government programs: The strategic importance of 'I' before 'E'", *the Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications*, Volume 5 (4), halaman 10-19.
- Schlogl, C. (2005). "Information and knowledge management: dimensions and approaches", *Information Research*, 10 (4) paper 235 <<http://InformationR.net/ir/10-4/paper235.html>> (diakses pada 5 Mei 2014).
- USA. (1996). "Information Technology Management Reform Act (Clinger Cohen Act)." 1996, 495–519.
- Varavithya, Wanchai, and sichaikul, V. (2003). "The Development of Electronic Government: A Case Study of Thailand," 464–67.
- Wilson, T. D. (2003). *Information management*. In *International encyclopedia of information and library science*. London, UK: Routledge., pp. 263–278
- Yukl, G., (2001), *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Jakarta: Indeks.
- Yusup, P.M. (2012). *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*, Jakarta: Rajawali Pers